

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2018 - 2020)****Muhamad Solik Ubait Shobur^{1✉}, Kesi Widjajanti²**^{1,2}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang**Article Information Abstrak***History of Article:*

Received Januari 2023

Accepted Februari 2023

Published Mei 2023

Keywords:

Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya ketidak konsistenan hasil riset terdahulu, serta karena minimnya realisasi Belanja modal serta bagaimana meningkatkan Belanja modal di Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Pada riset ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil serta pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable moderasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten & Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020.

Data yang dipakai pada riset ini yaitu data sekunder berupa data Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi yang di dapat dari website resminya <http://www.bps.go.id>. Sedangkan data opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didapat dari website resminya <http://www.bpk.go.id>.

Hasil dari riset ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, 2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, 3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, 4) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, 5) Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, 6) Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

Abstract

Inconsistency of the results of previous studies, as well as the lack of realization of capital expenditures and how to increase capital expenditures in the Central Java Provincial Government, this study aims to determine the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund and the effect of economic growth as a moderating variable. General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds for Capital Expenditures at Regency and City Governments in Central Java Province in 2018-2020.

The data used in this study is secondary data in the form of Capital Expenditure data, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Economic Growth which can be obtained from the official website <http://www.bps.go.id>. Meanwhile, BPK's opinion data on Regional Government Financial Reports is obtained from its official website <http://www.bpk.go.id>.

The results of this study can be concluded as follows: 1) General Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure, 2) Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure, 3) Profit Sharing Fund has no effect on Capital Expenditure, 4) Economic Growth, 5) Economic Growth can Moderate the Effect of Special Allocation Fund and Capital Expenditure, 6) Economic Growth cannot Moderate the Effect of Revenue Sharing Funds and Capital Expenditures

✉ Alamat Korespondensi

Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang 59160

Email: robertshobur@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, maenurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri 3 Jenis Dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer yang di dapat dari Pemerintah Pusat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada publik.

Tujuan utama pada pembangunan daerah yaitu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan dan peningkatan pembangunan serta pemerataan pendapatan yang didapat antar daerah. Guna mencapai sasaran pada pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat. Hal ini dikarenakan pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah sangat berkaitan dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki dimana pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah daerah terlalu bergantung Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja modal guna pembangunan daerah dan belanja operasional dengan tidak mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah.

Tabel 1. Belanja Daerah Pemda Se Jawa Tengah Tahun 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Akun	Anggaran	Realisasi	Presentase Penyerapan Anggaran	Presentase terhadap Belanja Daerah
Belanja Pegawai	42.664.200	37.226.820	87,255%	36,70%
Belanja Barang Jasa	25.780.450	22.557.310	87,498%	22,24%
Belanja Modal	15.624.360	9.914.820	63,457%	9,78%
Belanja Lainnya	30.172.450	31.731.220	105,166%	31,28%
TOTAL BELANJA DAERAH	114.241.450	101.430.170	88,786%	

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Menurut tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Realisasi Belanja Modal hanya 9,78%

dari total Belanja Daerah, dengan adanya ketidak konsistenan hasil pada riset terdahulu serta adanya permasalahan terkait realisasi penyerapan anggaran Belanja Modal yang terjadi khususnya di Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, peneliti ingin menganalisa hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

DAU merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja daerah selain PAD, dan dana perimbangan lainnya. Semakin besar tingkat DAU yang didapat oleh Pemerintah Daerah menggambarkan kemandirian daerah tersebut, sehingga apabila daerah tersebut semakin banyak menerima DAU maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut masih ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, dapat digambarkan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum mampu menjadi daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004, hal inilah yang menyebabkan flypaper effect (Citra & Jatmiko, 2017).

Adanya Dana Alokasi Umum membuat independensi daerah menjadi kurang baik, sehingga mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada transfer pemerintah pusat semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya gejala bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan terpengaruh sumber penerimaan Dana Alokasi Umum.

Hasil riset (Eddy Sarwono & Saptantinah Puji Astuti, 2021), (Mulyani, 2016), (Suryantini et al., 2017), (Saud et al., 2020), (Nugraha & Dwirandra, 2016) dan (Hardiningsih et al., 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dengan belanja modal. Dalam risetnya, Berbagai kejelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal juga meningkat. Hal ini terjadi karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Menurut pedoman teori serta hasil riset tersebut maka hipotesis selanjutnya yaitu sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Adanya Dana Alokasi Khusus membuat independensi daerah menjadi kurang baik, sehingga mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada transfer pemerintah pusat semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya gejala bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan terpengaruh sumber penerimaan Dana Alokasi Khusus.

Hasil riset (Kuntari et al., 2019), (Suryantini et al., 2017), (Saud et al., 2020) dan (Malini, 2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara DAK dengan belanja modal. Dalam risetnya, Dana perimbangan yaitu perwujudan signifikansi keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan yakni Dana Alokasi Khusus, DAK yaitu dana yang berasal dari APBN dialokasikan terhadap pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas khusus yang termasuk urusan daerah dan utama nasional. Maksud dari DAK untuk membantu beban biaya dari aktivitas khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan atau penggunaan DAK diarahkan kepada aktivitas investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan bimbingan terhadap pemanfaatan DAK untuk aktivitas tersebut diharapkan dapat menaikkan pelayanan publik yang direlaskan dalam belanja modal.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berlandaskan pedoman teori dan beberapa hasil pengkajian tersebut maka hipotesis selanjutnya yaitu sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, "Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan kepada daerah menurut angka presentase yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program desentralisasi", dana bagi hasil terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber daya alam bersumber dari. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak terdiri dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi".

Hasil riset (Kuntari et al., 2019), (Suryantini et al., 2017) dan (Malini, 2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara DBH dengan belanja modal. DBH yaitu sumber pendapatan daerah yang bisa dibilang cukup potensial dan termasuk salah satu modal landasan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan serta memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teori dan pemaparan tertulis Pemerintah daerah bisa mematok belanja modal semakin tinggi jika anggaran DBH semakin tinggi pula, sebaliknya semakin kecil atau rendah belanja modal yang ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil sehingga DBH dapat berpengaruh positif pada Belanja Modal. Berlandaskan pedoman teori dan hasil dari beberapa riset tersebut maka hipotesis selanjutnya yaitu sebagai berikut :

H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Hasil riset (Hardiningsih et al., 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh DAU dan belanja modal. Dalam risetnya, jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang didapat dari pemerintah pusat. DAU yang jumlahnya signifikan akan mempengaruhi jumlah belanja modal pada suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memberikan stimulan pada peningkatan pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Pendapatan penduduk akan berdampak pada pula pada pendapatan Daerah. Menurut pedoman teori dan hasil dari riset tersebut maka hipotesis selanjutnya yaitu sebagai berikut:

H4 : Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Sesuai Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk pendapatan aset tetap dan segala aset lainnya yang memberi daya guna lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakupi belanja modal pada perolehan tanah, bangunan dan gedung, peralatan, dan aset tak berwujud. Dengan adanya belanja modal tersebut diharapkan adanya multiplier effect, secara makro dan

mikro bagi perekonomian nasional Indonesia dan khususnya bagi daerah

Daerah yang Pertumbuhan Ekonominya baik, maka perkembangan dari kegiatan perekonomian tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Saputera & Pandoyo, 2020).

H5 : Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan penunjang daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu

terjadinya pengaruhnya Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada belanja modal.

H6 : Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/riset ini yaitu riset kuantitatif, sumber Data pada riset ini yaitu data Sekunder, sumber data pada riset ini terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal bersumber dari dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2018-2020 pada laman www.bps.go.id. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita didapat dari katalog Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021 pada laman Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu www.bps.go.id. Sedangkan data opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didapat dari website resminya <http://www.bpk.go.id>. Populasi dalam riset ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 dengan jumlah 35 Kabupaten dan Kota. Teknik riset ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang dipilih dalam riset ini menggunakan kriteria yaitu:

1. Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah
2. Memiliki data laporan keuangan yang dibutuhkan,
3. Mendapat opini dari BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan untuk laporan keuangan secara berturut-turut dalam kurun waktu tahun 2018-2020,

Kabupaten atau Kota yang tereliminasi yaitu Kabupaten Brebes karena mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan yaitu kolmogorov sminov, yakni apabila nilai hasil uji sig yang didapat lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tolerance atau variance inflation faktor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga data dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Glesjer. Apabila probabilitas signifikansi dari masing-masing variabel independen > 0,05, disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi pada model regresi

d. Uji Autokorelasi

Untuk dapat menentukan autokorelasi pada riset ini yaitu dengan menggunakan uji Run Test

2. Moderated Regression Analysis (MRA)

Pada riset ini semua hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda. Jenis data yang dipakai dalam riset ini merupakan data kuantitatif, dengan jenis time series dalam bentuk tahunan.

3. Uji Hipotesis

- a. Uji Parsial (Uji Statistik t)
- b. Uji Simultan (Uji Statistik f)
- c. Koefisien Determinasi (R²)

HASIL DAN PEMBAHSAN

1. STATISTIK DESKRIPTIF

Penyajian statistik deskriptif berguna untuk melihat profil dari data riset tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam riset tersebut. Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi),Berikut ini yaitu hasil output perhitungan deskriptif statistic menggunakan SPSS:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	86	113622509.0000	663321198.0000	345304921.220930	111578890.7890358
Dana Alokasi Umum	86	440041244.0000	1437036239.0000	983277059.511628	225805181.6051264
Dana Alokasi Khusus	86	94845071.0000	477533051.0000	311138135.279070	84459864.4880047
Dana Bagi Hasil	86	17113151.0000	61674610.000	33026985.465116	9255644.1046710
Pertumbuhan Ekonomi	86	-.0267	.0645	.033251	.0335615
Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi	86	-26956070.5267	90829278.4539	32317863.876202	34442888.3822240
Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi	86	-9217847.9935	30803442.9348	10123165.190093	11155582.1673990
Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi	86	-1105215.8590	2767806.1261	1030846.511431	1158750.1277471

2. UJI ASUMSI KLASIK

A. UJI NORMALITAS

Tabel 3. Hasil Uji One-Sampel Kolmogorov-Sminrov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000001
	Std. Deviation	81853559.33786462
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.040
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Menurut uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test didapat nilai Asymp.sig. sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data pada riset terdistribusi normal.

B. UJI MULTIKOLINIERITAS

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Dana Alokasi Umum	.346	7.757
	Dana Alokasi Khusus	.250	3.019
	Dana Bagi Hasil	.823	9.605
	Pertumbuhan Ekonomi	.281	8.861
	Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi	.316	8.378
	Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi	.128	7.649
	Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi	.303	6.669

Menurut tabel. 3 didapat nilai tolerance lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10,00 sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah multikolinieritas

C. UJI HETEROKSEDASTISITAS

Tabel 5. Hasil Uji Heteroksedastisitas Menggunakan Gledser

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
		1	(Constant)
	Dana Alokasi Umum	.224	.823
	Dana Alokasi Khusus	.037	.971
	Dana Bagi Hasil	.641	.523
	Pertumbuhan Ekonomi	.121	.904
	Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi	.838	.404
	Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi	-1.443	.153
	Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi	1.556	.124

a. Dependent Variable: ABS RES

Menurut uji heteroskedastisitas dengan metode glesjer test didapat nilai signifikansi variabel Independen dan Dependet lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

D. UJI AUTOKORELASI

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-4146681.71314
Cases < Test Value	43
Cases >= Test Value	43
Total Cases	86
Number of Runs	39
Z	-1.085
Asymp. Sig. (2-tailed)	.278

Menurut hasil output spss menggunakan uji run test diatas menunjukkan nilai (Test Valuea) yaitu -4146681,71314 dengan nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0,278 yaitu lebih besar dari 0,05 (0,278 > 0,05) yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual bernilai random atau acak atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

3. MODERATED REGRESSION ANALYSIS (MRA)

Tabel 7. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4162499 1.364	51445606. 202	
	Dana Alokasi Umum	-.001	.172	-.003
	Dana Alokasi Khusus	.880	.488	.667
	Dana Bagi Hasil	.026	1.264	.002
	Pertumbuhan Ekonomi	-1128	1686	-.339
	Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi	1.748	3.453	.534
	Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi	6.087	9.923	.602
	Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi	33.440	24.981	.344

Model riset ini menggunakan standardized coefficients. Karena ukuran variabel independen tidak sama, maka sebaiknya interpretasi persamaan regresi menggunakan standardized beta. Hasil pengujian regresi dari variabel-variabel dalam riset ini menggunakan program SPSS yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 DBH + \beta_4 DAU * PE + \beta_5 DAK * PE + \beta_6 DBH * PE + e$$

$$BM = 41.624.991,364 + (-0,003 DAU) + 0,667 DAK + 0,002 DBH + 0,534 DAU * PE + 0,602 DAK * PE + 0,344 DBH \beta PE + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

PE = Pertumbuhan Ekonomi

4. UJI HIPOTESIS

A. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t yaitu dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Hasil uji t (Uji Parsial) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
		1	(Constant)
1	Dana Alokasi Umum	-.007	.994
	Dana Alokasi Khusus	4.802	.002
	Dana Bagi Hasil	0.020	.084
	Pertumbuhan Ekonomi	-.402	.021
	Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi	.506	.071
	Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi	2.613	.012
	Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi	3.316	.185

Menurut hasil pengolahan data pada tabel, dapat diuraikan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1) Hasil Uji Hipotesis Pertama

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisiensi -0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,994 lebih besar dari 0,05 (0,994 > 0,05) dan nilai t hitung -0,007 < t tabel 1,99006, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” ditolak.

Tahun 2020 menjadi waktu tahun pertama terjadi Covid-19 dan dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia memperbolehkan Dana Alokasi Umum dialokasikan guna penanganan Covid-19 yang dimana sebagian belanja yang di realisasikan menjadi belanja operasional dan belanja pegawai. Selain itu, masih bolehnya Dana Alokasi Umum di realisasikan guna belanja diluar belanja modal menjadi faktor utama pada tahun 2018 s.d 2020 Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2) Hasil Uji Hipotesis Kedua

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisiensi 0,880 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) dan nilai t hitung $4,802 > t$ tabel 1,99006, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” diterima.

Pelaksanaan otonomi daerah berguna untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah akan menambah Belanja Modal tergantung dengan tingkat Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang diterima di Daerah tersebut, sehingga Semakin besar Dana Alokasi Khusus maka Belanja modal akan semakin tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja modal akan semakin rendah.

3) Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Bagi Hasil memiliki nilai koefisiensi 0,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,084 lebih besar dari 0,05 ($0,084 > 0,05$) dan nilai t hitung $0,020 < t$ tabel 1,99006, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” ditolak.

Pemerintah Daerah mendapat Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, atas dana Bagi Hasil yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah ini Pemerintah Daerah berhak memutuskan penggunaan Dana Bagi Hasil pada Daerah setempat dan tidak ada larangan apabilalau di alokasikan diluar belanja modal, selain itu masih kecilnya Dana Bagi Hasil yang disalurkan Pemerintah Pusat pada Daerah dibandingkan realisasi Belanja Modal membuat Dana Bagi Hasil yang didapat tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4) Hasil Uji Hipotesis Keempat

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisiensi 1,748 dengan nilai signifikansi sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05 ($0,071 > 0,05$) dan nilai t hitung $0,506 < t$ tabel 1,99006, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga Variabel pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal” ditolak.

Penurunan realisasi belanja modal yang signifikan pada tahun 2020 dikarenakan adanya refofusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna upaya penanganan Covid-19, anggaran yang sudah di canangkan guna belanja modal dirubah alokasinya guna kepentingan yang lebih mendesak untuk penanganan Covid-19, hasil refofusing inilah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah guna upaya penanganan Covid-19 misalnya pada belanja barang persediaan misalnya masker, hand sanitizer, APD, alat uji medis, rapid test dan sejenisnya. Masih diperkenankannya penggunaan Dana Alokasi Umum untuk belanja lain diluar belanja modal menjadi penyebab Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

5) Hasil Uji Hipotesis Kelima

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisiensi 6,087 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05) dan nilai t hitung 2,613 > t tabel 1,99006, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga Variabel pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal” diterima.

Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan ekonomi pada Daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peruntukannya yang Sebagian diperuntukkan untuk belanja modal karena minimal 95% dari Dana Alokasi Khusus Fisik dialokasikan Pemerintah Daerah guna pembangunan/kegiatan fisik Belanja Modal.

6) Hasil Uji Hipotesis Enam

Menurut Hasil Uji t pada tabel diatas menunjukkan Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisiensi 33,440 dengan nilai signifikansi sebesar 0,185 lebih besar dari 0,05 (0,185 > 0,05) dan nilai t hitung 3,316 > t tabel 1,99006, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga Variabel pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi dapat Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal” ditolak.

Dengan prosentase Dana Bagi Hasil yang relative kecil dibandingkan dengan Belanja Modal ini serta kegunaan Dana Bagi Hasil yang dapat digunakan selain belanja modal membuat Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

B. Uji Simultan (Uji Statistik f)

Pengujian ini berguna untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018). Berikut Hasil Uji f (Uji Simultan) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji f

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4887367139 41911680.00	8145611 8990318 624.000	11.299	.000 ^b
	Residual	5695004399 83572990.00	7208866 3289059 87.000		
Total		1058237153 925484670.00			

Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai f hitung 11,299 > 2.21419 . Sehingga variabel, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi. secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

C. Koefisien Determinasi (R2)

(Ghozali, 2018) mengungkapkan “Koefisien determinasi digunakan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square).Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu.”

Berikut ini hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.421	4905043.0122145

Dari tabel diatas hasil nilai koefisien determinasi (adjusted R square) yaitu sebesar 0,421 dapat diartikan 42,1% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independe, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum*Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus*Pertumbuhan Ekonomi, Dana

Bagi Hasil*Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 57,9% (100% - 42,1%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

SIMPULAN

- a. Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, penggunaan Dana Alokasi Umum yang kegunaannya di serahkan kepada daerah dan masih dapat digunakan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil menyebabkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada Belanja Modal.
- b. Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, penggunaan Dana Khusus yang kegunaannya sudah terinci salah satunya terkait Dana Alokasi Khusus Fisik yang kegunaannya dikhususkan untuk pembangunan fisik membuat Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus guna pembangunan fisik yang ada pada daerah, hal ini membuat Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Belanja Modal.
- c. Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, penggunaan Dana Bagi Hasil yang kegunaannya di serahkan kepada daerah dan masih dapat digunakan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil selayaknya Dana Alokasi Umum menyebabkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada Belanja Modal.
- d. Pertumbuhan Ekonomi tidak Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, dengan pertumbuhan ekonomi ketika mengalami peningkatan maaupun penurunan tidak dapat membantu memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, hal ini karena penggunaan Dana Alokasi Umum yang diperbolehkan penggunaannya untuk

belanja operasional maupun belanja pegawai.

- e. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, dengan pertumbuhan ekonomi ketika mengalami peningkatan maaupun penurunan mampu membantu memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, hal ini karena Dana Alokasi Khusus Fisik diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipergunakan untuk pembangunan fisik, Pemerintah Pusat akan menghitung Dana Alokasi Khusus pada Daerah dengan salah satunya memperhatikan kesejahteraan rakyat yang dapat diukur dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Pertumbuhan Ekonomi tidak Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020, Dana Bagi Hasil meskipun dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable moderasi tidak tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini karena penggunaan Dana Bagi Hasil yang masih dapat diperuntukkan penggunaannya untuk belanja operasional maupun belanja pegawai.

Hasil riset ini mendukung *Agency Theory*, Menurut *Agency Theory* berkaitan dengan hasil pada riset ini bahwa Pemerintah Pusat dipandang sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah sebagai agen, dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kontrak antara principal dan agen. Pemerintah Daerah mempunyai hak membelanjakan Penerimaan Daerah sesuai ketentuan berlaku salah satunya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan.

Menurut dari riset yang telah dilakukan, maka diharapkan ada dampak yang akan timbul bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Implikasi-implikasi yang muncul, yaitu:

- a. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat terus melakukan restrukturisasi sumber daya manusia untuk menekan belanja pegawai dan lebih mengutamakan alokasi anggaran ke belanja modal yang akan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan sebaik mungkin untuk lebih meningkatkan lagi terhadap pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana publik yang lebih baik dan memadai melalui belanja modal, karena hal ini akan sangat nampak meningkatkan produktivitas masyarakat dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Diharapkan Pemerintah Daerah agar lebih mengembangkan potensi dari sektor-sektor ekonomi daerah masing-masing untuk menambah penerimaan daerah, sehingga dapat tercipta peningkatan kemandirian daerah pada PAD dan tidak bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat serta guna menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Saran-saran yang dapat penulis ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil riset ini untuk memperbaiki riset selanjutnya, sebagai berikut:

- a. Diharapkan peneliti mendatang dapat memperluas atau menambah populasi dan sampel riset seperti kabupaten/kota se-Jawa ataupun se-Indonesia dengan periode pengamatan yang bisa lebih panjang.
- b. Riset selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel riset lain yang memiliki kaitannya dengan riset ini sehingga dapat memberikan hasil riset yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang mendukungnya, seperti derajat kontribusi BUMD dan ataupun Luas Wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Citra, C. K. B., & Jatmiko, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Terjadinya Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 121-130. <https://doi.org/10.18196/rab.010211>

Eddy Sarwono, A., & Saptantinah Puji Astuti, D. (2021). The Role of Moderating Economic Growth Variables on the Effect of Allocation Funds and Capital Expenditures in Local Government. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(3), 471-475. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i3.95>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, P., Meita Oktaviani, R., & Srimindarti, C. (2018). Regional Capabilities, Transfers And Wide Of Area Influence To Capital Expenditures With Moderation Of Economic Growth. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1), 47-74. <https://doi.org/10.33312/ijar.334>

Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1).

Malini, H. (2021). Factors Affecting Capital Expenditures and Community Welfare in Kalimantan. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i2.4316>

Mulyani, H. (2016). *The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government*. 163-166. <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.29>

Nugraha, I. P. B. I. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 284-311.

Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). *Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah*. 3, 17–28.

Saud, I. M., Asterina, E., & Trisha, G. F. (2020). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Empirical Evidence from Regency/City Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102150>

Suryantini, N. P. S., Candraningrat, I. R., & Kusumadewi, N. M. W. (2017). the Influence of Dau (General Allocation Fund) and Dak (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(2), 1–9.